

Ketika Pers Indonesia Berbuat Kesalahan



Oleh:

**Dr. Atik Krustiyati,
S.H., M.S**

Sekretaris ISWI Surabaya,
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

HARI Kamis tanggal 9 September 2012 ini merupakan hari Pers Nasional. Sebagai orang diluar pers tetapi mencintai Pers saya mengucapkan selamat menperingati Hari Pers Nasional. Semoga Pers Indonesia dapat lebih berperan dalam pembangunan bangsa. Harapan ini tentunya tidak berlebihan mengingat dalam pasal 6 huruf b Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa: "Pers nasional melaksanakan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan".

Selanjutnya dalam huruf e ditegaskan pula bahwa Pers nasional berperan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari rumusan ini nampaklah bahwa peran Pers nasional tidak hanya sekedar memberitakan peristiwa secara pasif, tetapi lebih dari itu. Artinya Pers nasional juga diharapkan dapat terlibat dalam persoalan-persoalan di masyarakat, bangsa dan negara. Singkatnya Pers dituntut agar bersifat proaktif dan melakukan pemberitaan secara impar-tial. Oleh karena itu tulisan ini sengaja diberi judul **KETIKA PERS BERBUAT KESALAHAN**, sebuah kalimat yang mengandung harapan dan sekaligus peringatan kepada Pers Indonesia.

Semula pengertian Pers hanya sebatas pada media cetak, akan tetapi kemudian diperluas dengan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian jika terdapat perkembangan dalam media sebagai saluran informasi, seperti internet misalnya seharusnya tetap dapat dilindungi oleh Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers.

■ Baca Ketika ...hal 6

Kebebasan Pers sebagai Fondasi HAM

■ **KETIKA...**

Sambungan dari Hal 3

Perluasan pengertian Pers sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang no 40 tahun 1999 adalah sebagai berikut: "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."

Keinginan adanya harapan dan sekaligus peringatan kepada Pers Indonesia sebagaimana disebutkan dalam judul tulisan ini, berdasarkan pada fakta adanya kemerdekaan Pers. Artinya kemerdekaan Pers itu bersumber dari kedaulatan rakyat dan milik rakyat yang ditegakkan untuk kepentingan rakyat.

Kemerdekaan Pers ditegakkan sebagai perisai bagi rakyat dari kesewenang-wenangan negara dan atau penguasa. Selain itu kemerdekaan Pers juga merupakan perisai bagi rakyat terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, fondasi HAM untuk hidup bermartabat adalah kemerdekaan berekspresi dan memperoleh informasi,

yang secara teknis hanya dapat terlaksana dengan adanya kemerdekaan Pers.

Pandangan tersebut diatas perlu diungkapkan karena masih banyak orang yang menganggap bahwa kemerdekaan Pers merupakan tuntutan insan pers untuk memperoleh keistimewaan dan kekhususan dalam masyarakat. Bahkan ada yang menganggap bahwa hal itu merupakan privilege yang dituntut oleh insan Pers. Kemerdekaan Pers yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 harus dipahami sebagaimana mestinya. Salah satu cara mengukur ada tidaknya kemerdekaan Pers itu hendaknya setiap orang menempatkan dirinya sebagai

Society

SABTU KLIWON, 11 FEBRUARI 2012

⊛ Feb 2012